

PENGELOLAAN PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL DI KABUPATEN JEMBER

(Studi terhadap PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari
Kecamatan Mumbulsari Jember tahun 2011- 2015)

Ria Angin* Popong Mega Putra**

* Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

**Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Kajian tentang pengelolaan program keaksaraan fungsional di Kabupaten Jember di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Jember memiliki tujuan untuk mendepelutiakan pengelolaan program keaksaraan fungsional dan bagaimana kontribusi para pihak dalam pengelolaan PKBM Nurul Huda. Adapun metode kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif. Di mana dalam metode ini kajian dalam pengumpulan data menggunakan data primer berupa *observasi* (pengamatan) dan *interview* (wawancara). Sedangkan untuk data sekunder penulis menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilakukan oleh penulis ditemukan fakta, bahwa: 1). PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam program keaksaraan fungsional sudah baik, dengan melalui mekanisme, antara lain: a). Perencanaan program keaksaraan fungsional, dan b). Pelaksanaan program keaksaraan fungsional (Pengorganisasian, pengarahan/pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, dan evaluasi program). 2). Keterlibatan Dinas Pendidikan dalam program keaksaraan fungsional di PKBM Nurul Huda masih belum optimal. Dinas Pendidikan hanya melakukan pengawalan program saja, tanpa melakukan pembinaan kelembagaan PKBM secara optimal dan profesional.

Kata kunci: Pengelolaan, Kebijakan dan Keaksaraan Fungsional.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember diarahkan pada upaya pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin yang ditandai terpenuhinya kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan/perumahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan dan kondisi sosial ekonomi melalui program-program prioritas. Pendidikan formal (penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah, penjaminan mutu pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat, pemenuhan standar pelayanan minimal); dan pendidikan non formal (penuntasan buta aksara (keaksaraan fungsional), pendidikan anak usia dini, kesetaraan Paket A, B, C, kesetaraan gender, kecakapan hidup dan mutu dan relevansi pendidikan non formal) merupakan prioritas program bidang pendidikan.

Kualitas pendidikan yang relatif masih rendah, dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik, terutama disebabkan belum memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan tenaga pendidik; masih rendahnya kesejahteraan pendidik; fasilitas belajar mengajar belum tersedia secara mencukupi; dan biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai. Isu strategis lainnya dalam pembangunan bidang pendidikan adalah masih lebarnya kesenjangan partisipasi pendidikan; belum meratanya fasilitas pendidikan menengah; masih rendahnya kualitas pendidikan; keterbatasan pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah; dan, belum efektif dan efisiennya manajemen pendidikan merupakan persoalan utama dan umum pendidikan di Kabupaten Jember.

Pada dasarnya pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berbagai upaya pembangunan pendidikan termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kabupaten Jember. Namun demikian sampai saat ini tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah. Sampai dengan tahun 2004, Angka Partisipasi murni untuk jenjang SD/MI mencapai 97,35 persen, SMP/MTs mencapai 51,04 persen dan SMA/MA baru mencapai 29,9 persen. Sedangkan Angka Putus Sekolah untuk SD/MI sebesar 0,63 persen, SMP/MTs sebesar 0,41 persen dan SMA/MA sebesar 1,43 persen. Sementara itu angka buta huruf penduduk usia 15 – 44

tahun mencapai 22.827 orang. Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global dan belum mencukupi pula sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).

Adanya ketimpangan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bukan saja terjadi pada penduduk usia sekolah, tetapi juga terjadi antar wilayah geografis antara perkotaan dan perdesaan, gender serta antar kawasan. Perkembangan pendidikan mengungkapkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun harus bekerja. Hal tersebut berdampak pada tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Sebagian dari masyarakat menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikan manfaat yang signifikan atau sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata. Fasilitas pelayanan pendidikan di daerah perdesaan dan terpencil yang masih terbatas menyebabkan sulitnya anak-anak terutama anak perempuan untuk mengakses layanan pendidikan. Selain itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai.

Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh (1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, (2) kesejahteraan pendidik yang masih rendah, (3) fasilitas belajar belum mencukupi, dan (4) biaya operasional pendidikan belum memadai. Pada tahun 2014 ada sekitar 35 persen gedung sekolah mengalami kerusakan berat. Di sisi yang lain pengentasan buta aksara masih menjadi persoalan tersendiri di Kabupaten Jember yang tak kunjung tuntas, meskipun Pemerintah Kabupaten Jember mengklaim punya mekanisme pengembangan pendidikan non formal sebagai tabel berikut dalam lima tahun kedepan (2011- 2015):

Tabel 1 Jenis Pengembangan Program Pendidikan Non Formal

PROGRAM	JENIS
Program Pendidikan Non Formal	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal
	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal
	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal
	Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal
	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal
	Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal
	Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal
	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sumber: Berdasarkan Temuan Lapangan

Berdasarkan uraian terkait dengan jumlah buta aksara yang masih tinggi di Kabupaten Jember dan program pengembangan pendidikan non formal, khususnya pengentasan buta aksara yang tak kunjung tuntas. Maka selanjutnya penulis akan melakukan kajian terhadap hal tersebut dengan topik yang lebih mikro dengan judul **“Pengelolaan Program Keaksaraan Fungsional di Kabupaten Jember (Studi terhadap PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Jember tahun 2011- 2015)”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pengelolaan Kelembagaan

Menurut Bafadal (2003: 1) pengelolaan merupakan proses pendayagunaan semua sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahap proses meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. pengelolaan adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Arikunto (1983: 7),

pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi.

Fungsi Pengelolaan Kelembagaan

Fungsi pengelolaan adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya dan dilaksanakan oleh orang-orang, lembaga atau bagian-bagiannya yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Fungsi pengelolaan meliputi beberapa kegiatan yaitu: perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, komunikasi, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan. Purwanto (2009: 14) menambahkan fungsi pengelolaan dengan kegiatan evaluasi.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa fungsi pengelolaan itu berwujud kegiatan yang berurutan dan berhubungan sehingga satu kegiatan menjadi syarat bagi kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan itu harus dan dapat dilaksanakan oleh seseorang dan atau kelompok yang tergabung dalam suatu organisasi. Para pakar pengelolaan mengemukakan fungsi pengelolaan menurut rangkaian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan antara lain oleh keragaman latar belakang profesional para pakar, perbedaan situasi yang dihadapi, variasi pendekatan yang digunakan dalam menerapkan fungsi pengelolaan, serta berkembangnya tuntutan dan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pengelolaan. Menurut Ambarita (2006: 73), secara umum pengelolaan terdiri atas perencanaan (persiapan), pelaksanaan dan penilaian (evaluasi) pembelajaran. Fungsi-fungsi pengelolaan tersebut antara lain: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian atau evaluasi dan pengembangan.

Pengertian Buta Aksara

Buta aksara merupakan masalah yang sangat kompleks di dunia pendidikan, buta aksara sering melanda masyarakat yang ada di daerah atau di pinggiran. Orang yang mengalami buta aksara mereka akan sangat sulit dalam mengikuti perkembangan yang ada di lingkungannya. Buta aksara adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Hal ini menjadi masalah yang di hadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, buta aksara harus diberantas untuk mencerdaskan sekaligus mensejahterakan rakyat. Pemerintah mempunyai program-program untuk memberantas buta aksara. Kita selaku

akademisi seharusnya membantu pemerintah untuk memberantas buta aksara (Permana: 2011).

Sasaran Program Keaksaraan Fungsional.

Sebagaimana yang kita ketahui, pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan pembelajaran Keaksaraan Fungsional sebagai salah satu upaya pendukung rencana strategi penurunan angka buta aksara di Indonesia. Dan di dalam pembelajaran program keaksaraan fungsional memiliki sasaran umum yang terdiri dari masyarakat orang dewasa yang belum melek aksara yakni yang belum bisa membaca dengan baik sehingga pengetahuan mereka sangatlah rendah. Program Keaksaraan Fungsional ini lebih mengkonsentrasikan kepada kelompok usia produktif yaitu umur 20 - 50 tahun. Sedangkan dalam peringkat nasional, Jawa Timur merupakan provinsi terbesar pertama untuk angka buta aksaranya.

Tujuan Program Keaksaraan Fungsional

Program yang digulirkan pemerintah dengan nama "Keaksaraan Fungsional" (KF) disebut sudah mengena untuk menjawab pertanyaan mendasar serta kebutuhan masyarakat yang menyandang buta aksara di berbagai daerah. Melalui program ini, pemelek-aksaraan masyarakat diharapkan menjadi fungsional, yakni sejalan dengan peningkatan kualitas hidup suatu masyarakat. Dan tujuan ideal program Keaksaraan Fungsional itu ialah penguasaan baca tulis dan berhitung yang menjadi syarat mutlak untuk menguasai keterampilan dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

Tujuan lain dari Program Keaksaraan Fungsional adalah sebagai media untuk memberikan kemampuan pada masyarakat dalam mengerti sebuah bacaan, memahami berbagai macam perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangan modern kata ini lalu diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu bacatulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Kebijakan Publik Terkait Keaksaraan Fungsional

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi

sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7). Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Dalam hal ini isu buta kasara menjadi isu penting, karena nantinya bermanfaat dan berdampak pada kesejahteraan warga bangsa. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif, di mana lokasi penelitian dilakukan di PKBM Nurul Huda. Dengan unit analisis kajian adalah para pengelola dan tutor PKBM Nurul Huda serta pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, dengan metode pengumpulan data berupa: 1). Pengumpulan data primer, dan 2). Studi Pustaka.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh penulis, selanjutnya akan dibahas terkait dengan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam program keaksaraan fungsional, meliputi: (1) pengorganisasian, (2) pengarahan dan pembinaan, (3) pengkoordinasian, (4) pengkomunikasian, dan (5) evaluasi.

Perencanaan Program PKBM

Perencanaan merupakan kemampuan dan keterampilan khusus dalam merencanakan sesuatu untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan

sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Perencanaan program yang ada di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Huda juga sama dengan PKBM yang lain, perencanaan program dilakukan di awal tahun dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, bahwa PKBM Nurul Huda sudah memiliki perencanaan yang sistematis. Perencanaan tersebut melalui pendataan secara berkala setiap tahun, berikut data terkait jumlah peserta keaksaraan fungsional dalam beberapa tahun:

Tabel. 4.3 Data Terkait Jumlah Peserta Keaksaraan Fungsional tahun 2011-2015

No.	Tahun	Jumlah Peserta KF
1.	2011	19
2.	2012	27
3.	2013	22
4.	2014	17
5.	2015	15

Sumber: berdasarkan hasil kajian

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah peserta keaksaraan fungsional di PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember mengalami jumlah yang fluktuatif, di mana jumlah tertinggi kepesertaan masyarakat dalam program keaksaraan fungsional terjadi pada tahun 2013, sedangkan jumlah kepesertaan masyarakat terendah dalam program keaksaraan fungsional terjadi pada tahun 2014. Fluktuasi jumlah kepesertaan masyarakat dalam program keaksaraan fungsional di PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember lebih disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut dalam program keaksaraan fungsional.

Namun demikian berkat perencanaan yang matang, pihak PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember mampu terus mendorong masyarakat yang buta huruf untuk terus ikut program keaksaraan fungsional. Seperti diulas oleh para pengelola bahwa mereka dalam melakukan perencanaan, perencanaan ini juga tergantung dari program yang di rencanakan, perencanaan dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan maupun program yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas, agar mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Kondisi tersebut salah satu penyebab lain adalah adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan melalui Bidang Pendidikan Non Formal. Selanjutnya perencanaan yang ada di PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember biasanya dilakukan di awal tahun. Perencanaan yang dilakukan PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember adalah menyiapkan warga belajar, menyiapkan program kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, menentukan tutor, menentukan waktu pelaksanaan, menentukan tempat berlangsungnya kegiatan, dan kemudian koordinasi dengan instansi terkait. Perencanaan program di PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dapat dilakukan dengan membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Perencanaan program dilakukan dengan membuat proposal kegiatan kemudian diajukan ke Dinas Pendidikan. Program dapat ditentukan dengan cara mendata masyarakat dan membuat skala prioritas, dari data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, jadi bila ada masyarakat yang membutuhkan program keaksaraan fungsional selain itu juga menentukan jumlah sasaran, menentukan penanggung jawab setiap program yang dilaksanakan.

Pelaksanaan Kegiatan PKBM dalam Program Keaksaraan Fungsional

Keaksaraan fungsional terdiri dari 2 konsep yaitu “keaksaraan” dan “fungsional”. Keaksaraan (*literacy*) secara sederhana diartikan sebagai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan fungsional (*functional*) berkaitan erat dengan fungsi dan tujuan pembelajaran serta adanya jaminan bahwa hasil belajarnya benar-benar bermakna dan bermanfaat (fungsional) bagi peningkatan mutu dan taraf hidup warga belajar (WB) dan kehidupan masyarakat (Depdiknas Dirjen PLS, 2005: 62).

Tujuan dari program ini yaitu memberikan keterampilan Baca Tulis dan Berhitung (Calistung) dan kemampuan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember agar warga belajar dapat terinci dalam bentuk pembelajaran melek aksara, angka, latin dan angka arab, melek bahasa indonesia dan pengetahuan dasar yang pada akhir pembelajaran nanti warga belajar diharapkan dapat meningkatkan mutu dan taraf hidup.

Strategi pelaksanaan program keaksaraan fungsional (KF) di PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, melalui:

1. Peranan tutor sangat penting dalam proses pembelajaran, antara lain sebagai pembimbing, pembina, fasilitator, motivator dan dinamisator kelompok belajar keaksaraan fungsional. Mengingat program keaksaraan fungsional berorientasi pada minat, kebutuhan pengalaman, cita-cita dan ide dari warga belajar, maka diperlukan tutor yang kreatif dan inovatif dalam membangkitkan minat belajar warga belajar agar terus bersedia melanjutkan belajar.
2. Program pembelajaran dirancang bersama warga belajar, yang berisi objek-objek spesifik yang dikembangkan berdasarkan minat dan kebutuhan nyata (*real needs*) yang dirasakan oleh warga belajar, dan dimulai dari satu bagian kebagian berikutnya sesuai kontrak belajar. Untuk program belajar keaksaraan fungsional, cukup terbagi menjadi 2 aspek Yaitu: aspek baca, tulis, hitung fungsional yang bertujuan meningkatkan mutu hidup dan aspek keterampilan fungsional yang mengacu pada peningkatan taraf hidup.
3. Proses pembelajaran Pendekatan yang digunakan pada awal pembelajaran adalah mengintegrasikan kegiatan Calistung dengan kegiatan keterampilan, belajar sambil usaha atau belajar berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Setiap topik yang mereka pelajari yang dikembangkan dengan strategi pembelajaran sebagai berikut: diskusi - menulis - membaca - berhitung dan aksi (bisa berupa kegiatan keterampilan atau kegiatan lainnya). *Keempat*, bahan dan media belajar Semua jenis bahan belajar, yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan berfungsi bagi diri warga belajar dapat digunakan dan dimanfaatkan. Tidak mesti berasal dari buku paket atau bahan belajar yang berisi informasi fungsional, tetapi bahan belajar ini dapat saja dibuat dan diciptakan sendiri oleh warga belajar bersama tutor dan semaksimal mungkin menggunakan media yang ada atau dapat disediakan dari lingkungan sekitar. Pelaksanaan kegiatan memiliki empat jenis fungsi yang di dalamnya mengandung pengorganisasian, pengarahan/ pembinaan, pengkoordinasian, dan pengkomunikasian. Dari keempat jenis fungsi pelaksanaan ini saling berkaitan: a). Pengorganisasian merupakan usaha mengintegrasikan sumber daya manusia dan non-manusia yang diperlukan kedalam satu kesatuan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana telah direncanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengorganisasian di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dilakukan oleh pengurus berdasarkan tanggungjawab dari setiap pengurus terutama ketua. Ketua PKBM selalu memberikan motivasi kepada anggota dan mengkondisikan bagaimana agar lembaga

tetap dinamis. Pelaksanaan pengelolaan pengorganisasian di PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dilakukan oleh pengurus berdasarkan tanggung jawab dari tugas masing-masing anggota berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), namun kinerja pengurus belum optimal dikarenakan pengurus, tutor maupun staf memiliki pekerjaan pokok di lembaga formal atau kantor sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Realitas tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang harus segera dibenahi, dengan melakukan penambahan tenaga tutor yang tidak memiliki latar belakang PNS, sehingga mampu menopang kinerja PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

b). Pengarahan atau pembinaan merupakan proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan intruksi kepada bawahan dan upaya memelihara atau membawa sesuatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya terlaksana. Pengarahan dan pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program keaksaraan fungsional yang sedang dilaksanakan oleh PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Ketua PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember selalu memberikan pengarahan dan pembinaan kepada semua anggota namun pengarahan dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) kemudian untuk pembinaan non teknis dilakukan oleh kepala desa yang merupakan pelindung bagi PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Pelaksanaan pengarahan dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan cara pertemuan antara Penilik PLS, pengurus dan tutor. Sedangkan untuk tutor dan warga belajar, pengarahan proses belajar dilakukan oleh tutor dengan prioritas usia 15-44 tahun yang saling berdekatan (bertetangga) dan memiliki keinginan berbagi pengalaman dalam rangka peningkatan mutu dan taraf hidup mereka. Berdasarkan hasil kajian, warga belajar program KF, terdiri dari dua karakteristik yaitu yang berasal dari buta aksara murni dan *droup out* Sekolah Dasar yang masih memerlukan layanan pendidikan keaksaraan sampai memenuhi kompetensi keaksaraan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, keaksaraan fungsional berpusat pada masalah, mengarahkan pengalaman belajar pada masalah yang dihadapi oleh warga belajar dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberantasan buta aksara memiliki tahapan, yaitu, tahap keaksaraan dasar dan tahap keaksaraan mandiri. Tahap keaksaraan dasar adalah warga belajar yang belum memiliki pengetahuan dasar tentang calistung (baca tulis hitung) tetapi telah memiliki pengalaman yang dapat dijadikan kegiatan pembelajaran. Terakhir, tahap keaksaraan mandiri adalah warga belajar telah memiliki pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan dalam konteks praktis pembelajaran di PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember diupayakan multi level yang berasal dari buta aksara murni atau *drop out* di SD/MI kelas 1-3, hal tersebut dilakukan guna memastikan proses belajar dinamis dan saling mengisi antar warga belajar. Pelaksanaan pengarahannya dan pembinaan terhadap program keaksaraan fungsional di PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember langsung dimintakan dari Dinas dan kepala desa agar PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dapat eksis dan melaksanakan sesuai dengan program. Ketua PKBM Nurul Huda juga melakukan pengarahannya dan pembinaan kepada tutor yang dilakukan setiap 1 bulan sekali.

c). Pengkoordinasian perlu dilakukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember karena koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan dari berbagai individu atau organisasi agar kegiatan dapat berjalan selaras sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi dan ini sudah menjadi kesepakatan kalau pelaksanaan dikoordinasikan terlebih dahulu dan ditindak lanjuti bersama. Pelaksanaan pengkoordinasian oleh Dinas Pendidikan dengan PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sudah cukup baik karena setiap kegiatan selalu melakukan koordinasi baik dari bawahan ke atasan maupun atasan ke bawahan. Pengkoordinasian di PKBM yang dilakukan oleh ketua sangat tergantung pada program yang dilaksanakan.

Sedangkan untuk warga belajar dengan warga belajar dengan melakukan koordinasi secara tidak langsung ke warga belajar. Namun melalui tokoh di sekitar warga belajar. Kenapa melalui tokoh? Hal tersebut guna penting dilakukan guna mampu mendorong para tokoh para tokoh bekerjasama dengan PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mempermudah proses pengumpulan dan pendataan warga belajar dan menyukseskan program KF. Koordinasi dilakukan selama 1 bulan sekali setiap Sabtu di minggu ke 4. Sedangkan koordinasi internal PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari

Kabupaten Jember dilakukan antar bawahan keatasan maupun atasan kebawahan sudah cukup baik. Ketua PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengkoordinasian dilakukan dengan cara mengundang dan mengajak rapat pengurus maupun tutor. Koordinasi yang dilakukan secara berkala oleh pihak PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program keaksaraan fungsional dilakukan secara terkoordinatif antar internal PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

d). Pengkomunikasian selalu dilakukan oleh setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses komunikasi di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember bisa dilakukan secara fleksibel, dengan adanya alat komunikasi yang semakin canggih maka komunikasi bisa dilakukan dengan relatif normal dengan cara SMS dengan memberitahu pihak keluarga yang sudah paham teknologi dan bisa membaca, telepon, maupun komunikasi langsung dengan bertatap muka. Komunikasi yang ada di PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember terkesan formal dan terkadang terkesan non formal karena jam kerja pengurus PKBM bisa dikatakan 24 jam bekerja.

Proses komunikasi di PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember berjalan dengan lancar, proses komunikasi bisa terhadap warga belajar dilakukan secara langsung pada saat proses belajar dilakukan, dan dengan melakukan kunjungan ke rumah- rumah warga belajar yang dilakukan oleh para tutor dan pengelola PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Pola tersebut dilakukan guna menjaga keraifan lokal yang ada di masyarakat, karena dengan didatangi langsung mereka merasa diperhatikan dan dihargai, bahkan mereka “pakewuh” kalau tidak aktif dalam proses pembelajaran, karena sudah diperhatikan.

Evaluasi Program Keaksaraan Fungsional

Dalam bidang pendidikan, evaluasi merupakan proses yang sistematis tentang mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi untuk menentukan sejauhmana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh peserta keaksaraan fungsional. Evaluasi dibidang pendidikan dapat dilakukan dengan cara Evaluasi Hasil Belajar (EHB). Pelaksanaan

evaluasi hasil belajar dilaksanakan diakhir program dengan penilaian proses disaat proses berlangsung.

Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan diakhir program, setiap 6 bulan sekali selama pelaksanaan program keaksaraan fungsional. Yang dilakukan setelah adanya evaluasi adalah hal- hal yang dianggap sudah baik maka di lanjutkan namun apabila masih ada yang kurang atau belum terlayani maka segera dilayani dan melakukan pembenahan agar bisa sesuai dengan prosedur. Adapun bentuk evaluasinya, antara lain: Evaluasi program, evaluasi proses kegiatan, evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi pembelajaran warga belajar terus menerus mengikuti perkembangan dan efek- efeknya pada komunitas, bila perlu mengadakan perbaikan program. warga belajar dan tutor bersama-sama menjadi evaluator. Penekanan pada proses evaluasi ini adalah pada evaluasi diri sendiri (self evaluation) dan kemajuan pembelajarannya.

Pelaku evaluasi adalah tutor keaksaraan fungsional yang bersangkutan kemudian dibawa ke forum tutor tingkat kabupaten agar mempunyai standarisasi yang jelas mengenai model kurikulum, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember hanya memfasilitasi peserta keaksaraan fungsional, agar mampu membaca menulis dan berhitung sebagai kebutuhan dasar dalam era sekarang.

Berdasarkan atas paparan di atas, nampaknya pola pengelolaan yang dilakukan oleh PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sudah relatif optimal, kekurangan yang ada pada pengelolaan PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember adalah kurang optimalnya kinerja tutor, hal tersebut disebabkan karena sebagian besar tutor *double job* sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di sisi yang lain Keterlibatan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan lebih hanya pada aspek bantuan dana, sedangkan untuk pembinaan yang lain masih perlu dioptimalkan, seperti adanya pelatihan berkala bagi penelola dan tutor PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, dan seringkali pihak Dinas Pendidikan melalui bidang pendidikan non formal untuk turun lapangan ke PKBM, yang selama ini jarang dilakukan, serta optimalisasi kinerja Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas Pendidikan yang ada di kecamatan dalam pembinaan PKBM, dengan ditungkan dalam sebuah kebijakan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam program keaksaraan fungsional sudah baik, dengan melalui mekanisme, antara lain: 1). Perencanaan program keaksaraan fungsional, dan 2). Pelaksanaan program keaksaraan fungsional (Pengorganisasian, pengarahan/ pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, dan evaluasi program).
2. Keterlibatan pemerintah dalam program keaksaraan fungsional di PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari masih belum optimal, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pendidikan hanya melakukan pengawalan program keaksaraan fungsional dengan hanya melakukan Pengorganisasian, dan pengarahan/pembinaan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1983). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto,. 2000. *Manajemen Penelitian*. PT. Rineka Cipta Jakarta. Cetakan ke-5.
- Bafadal, Ibrahim. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Jakarta: Gadjah Mada University Press
- Heru Hairudin. 2011. *Buta huruf*. [htt://herhaiper.blogspot.com/2011/06/buta-huruf.html](http://herhaiper.blogspot.com/2011/06/buta-huruf.html). Diakses pada tanggal 01 november 2012
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- M Irfan., 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Ngalim Purwanto. 2009. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nana Sudjana. (2004). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rochmat Soemitro. 2000. *Asas dan Dasar Perpajakan*. B.andung: Eresco.
- Sudjana.Nana.2004. *Dasar-dasar proses Belajar Mengajar*. Jakarta: sinar baru Algesindo
- Sudjana S, D.2003. *Pendidikan non formal: Wawasan sejarah perkembangan, falsafah dan teori pendukung, serta asas*. Bandung: Falah Production.
- Sondang P.Siagian. 1982. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudjana, N. 2004. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung, Sinar Baru Algensindo).